

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abi Zakaria Yahya. Matan Arbain An-Nawawiyah. Al- Ghawtsani, 2010.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Bulughul Maram. Darul Qabas, 2014.
- Aurangzeb, Muhammad. Al-Fatawa Al-Hindiyyah. Dar al-Fikr, t.t
- Aziz, Syaikh Zainuddin bin Abdul. Fathul Muin. Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2009.
- Asman. Dkk. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. PT Penamuda Media, 2023.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram, University Press, 2020.
- Sulaksono, Teori-teori Hukum Administrasi. Cv. Jakad Media Publishing, 2022.
- Ernawati, Ns, Hery, Aida Ratna Wijayanti, Bd, Anni F.M., Stat., , dan Fery Setiawan. PERNIKAHAN DINI – Culture Serta Dampaknya. CV. Amerta Media, 2022.
- L, Sudirman. Hukum Acara Peradilan Agama. IAIN Pare-pare Nusantara Press, 2021.
- M. Syukron Bustami. Hukum tentang perkawinan islam. Sada Kurnia Pustaka, 2024
- Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Kencana Prenada Group, t.t.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. SAGE Publications, 2013.
- Sarwat, Ahmad. Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan. PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sudikno, Mertokusumo. Hukum Acara Perdata. Liberty Yogyakarta, 1991.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019). Al Qur'an dan Terjemahan. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Umar haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. Hukum Perkawinan Islam. Gama Media, 2017

Zaidah, Yusna, dan M. Fahmi al Amruzi. Pernikahan dini masyarakat di Kalimantan Selatan. Cv banyubening cipta sejahtera, 2023.

Artikel

Afifah, Raihanah. “Komunikasi Persuasif Puspaga Dalam Menarik Minat Calon Pengantin (Studi Kasus pada Program Konseling Pranikah Puspaga Kota Banjarmasin).” JURNAL PERSUASI 1, no. 1 (2024). <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/psik/article/view/12702>.

“Arti kata kedudukan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 3 Maret 2025. <https://kbbi.web.id/kedudukan>.

Fadillah, Rahmat Fadillah, dan M. Beta Subehi. “Perjanjian Pranikah Untuk Tidak Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Indonesia.” Interdisciplinary Explorations in Research Journal 2, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.531>.

Hadaiyatullah, Syeh Sarip, dan Nurul Huda. “PRAKTEK HUKUM ACARA DISPENSASI KAWIN.” ASAS 12, no. 01 (2020): 150–66. <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.7133>.

Hairani Siregar, Aurelia Meldy, Putri Lyana, dan Zaskia As-Syifa. Dampak Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Keluarga. Volume 9 Nomor 2 Tahun 2025 (2025).

Hukum, Karya. “Teori Kewenangan - Karyahukum.” Karya Hukum Indonesia, 20 Oktober 2024. <https://www.karyahukum.com/2024/06/teori-kewenangan-karyahukum.html>.

Karyadi, I. Putu Dede, dan Putu Sekarwangi Saraswati. “PERANAN DISKRESI HAKIM DALAM KEWENANGAN MENGADILI.” Jurnal Hukum Mahasiswa 2, no. 1 (2022): 123–28.

“Kompilasi Hukum Islam (KHI).” Konsultasi Agama Islam Online, t.t. Diakses 27 Februari 2026. <https://www.alkhoirot.net/2024/05/kompilasi-hukum-islam-khi.html>.

Kurniadi, Moch Rizky Prasetya. “4 Arti Kata Peran di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” KBBI, 9 Maret 2024. <https://kbbi.lektur.id/peran>.

Kurniadi, Moch Rizky Prasetya. “5 Arti Kata Penetapan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” KBBI, 9 Maret 2024. <https://kbbi.lektur.id/penetapan>.

“Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Bauntung Batuah.” Diakses 2 Maret 2026. <https://dpppa.banjarmasinkota.go.id/p/layanan-pusat-pembelajaran-keluarga.html>.

- Lestari, Diah Noval, Nunik Retno Herawat, dan Turtiantoro - -. "PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN DALAM UPAYA MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI TAHUN 2021." *Journal of Politic and Government Studies* 12, no. 1 (2022): 1.
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiyah Rusdiyah, dan Diana Rahmi. "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan." *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.
- Mustinda, Lusiana. "Hukum Pernikahan dalam Islam Menurut 4 Mahzab." *detikhikmah*. Diakses 23 Mei 2025. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7498332/hukum-pernikahan-dalam-islam-menurut-4-mahzab>.
- Nasution, Wilda Rahma. "PERNIKAHAN USIA DINI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF." *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i2.9517>.
- "Pelaksanaan Konseling dan Pengaruh Hasil Konseling dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Martapura Kelas IB - IDR UIN Antasari Banjarmasin." Diakses 11 Februari 2025. <https://idr.uin-antasari.ac.id/23740/>.
- "Profil Kota Banjarmasin - Website Pemerintah Kota Banjarmasin." Diakses 19 Desember 2025. <https://www.banjarmasinkota.go.id/p/profil-kota-banjarmasin.html>.
- "Putri - BUKU AJAR HUKUM PERKAWINAN & KEKELUARGAAN.pdf." t.t. Diakses 23 Mei 2025. <https://repository.ubharajaya.ac.id/12642/1/Buku%20Hukum%20Perkawinan%20dan%20Kekeluargaan.pdf>.
- SARAH SALSABILLA, -. "IMPLEMENTASI PROGRAM PUSPAGA (PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA) DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN DINI DI KOTA PEKANBARU." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024. <https://repository.uin-suska.ac.id/80345/>.
- Yasin, Muhammad. "Dispensasi Perkawinan Tetap Dimungkinkan, Begini Syaratnya Menurut UU Perkawinan yang Baru." *hukumonline.com*. Diakses 16 Januari 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dispensasi-perkawinan-tetap->

[dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru-lt5db127b0b52f3/](https://repository.uin-suska.ac.id/73251/).

YUDHA ILYAS PUTRA, -. “EFEKTIVITAS PROGRAM PUSPAGA (PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA) DALAM MENGEDUKASI TINGKAT PERNIKAHAN DINI DI KOTA PEKANBARU.” Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023.
<https://repository.uin-suska.ac.id/73251/>.

Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.